



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER II
ESELON I



20
22

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 20 Februari 2023
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Depok, 20 Februari 2023
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.152.919.280,00 atau mencapai 301% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.047.500,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp223.990.194.502,00 atau mencapai 98% dari alokasi anggaran sebesar Rp229.437.166.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.454.665.078.497,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp476.702.771,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.451.448.336.784,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.740.038.942,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp450.235.532,00 dan Rp1.454.214.842.965,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.128.400.247,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp226.722.603.313,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp225.594.203.066,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp965.378.085,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp224.628.824.981,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.444.031.040.202,00 ditambah Surplus/Defisit-

LO sebesar (Rp224.628.824.981,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp476.300.693,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp235.288.928.437,00 kenaikan/penurunan ekuitas Rp10.183.802.763,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.454.214.842.965,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		%	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.047.500.000	3.152.919.280	301	2.390.398.387
JUMLAH PENDAPATAN		1.047.500.000	3.152.919.280	301	2.390.398.387
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	34.211.419.000	33.754.872.381	99	34.020.333.152
Belanja Barang	B.4	171.568.647.000	166.822.922.118	97	124.595.754.966
Belanja Modal	B.5	23.657.100.000	23.412.400.003	99	118.625.263.099
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		229.437.166.000	223.990.194.502	98	277.241.351.217

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	1.034.418.773
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.10	-	-
Persediaan	C.11	476.702.771	434.783.170
Jumlah Aset Lancar		476.702.771	1.469.201.943
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.13	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.15	116.512.418.038	92.877.000.717
Gedung dan Bangunan	C.16	353.165.757.229	335.299.814.950
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	12.359.677.154	9.395.644.993
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.074.558.997	2.972.643.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	-	6.958.045.430
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(122.664.142.634)	(96.521.081.709)
Aset Tetap yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Tetap		1.451.448.336.784	1.439.982.136.378
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	3.143.147.433	2.537.559.833
Aset Lain-Lain	C.22	5.188.629.286	8.310.389.928
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(5.710.237.777)	(8.192.449.669)
Jumlah Aset Lainnya		2.621.538.942	2.655.500.092
JUMLAH ASET		1.454.546.578.497	1.444.106.838.413
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	349.715.146	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	100.520.386	75.798.211
Uang Muka dari KPPN	C.27	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		450.235.532	75.798.211
JUMLAH KEWAJIBAN		450.235.532	75.798.211
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	1.454.096.342.965	1.444.031.040.202
JUMLAH EKUITAS		1.454.096.342.965	1.444.031.040.202
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.454.546.578.497	1.444.106.838.413

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.128.400.247	1.061.438.630
JUMLAH PENDAPATAN		1.128.400.247	1.061.438.630
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	33.754.872.381	34.020.333.152
Beban Persediaan	D.3	3.096.062.207	1.953.991.427
Beban Barang dan Jasa	D.4	125.093.169.683	94.190.195.817
Beban Pemeliharaan	D.5	15.868.728.321	11.939.285.152
Beban Perjalanan Dinas	D.6	23.321.516.982	16.616.890.640
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	25.588.253.739	19.961.407.876
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		226.722.603.313	178.682.104.064
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(225.594.203.066)	(177.620.665.434)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		197.982.699	79.141.388
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		767.395.386	971.841.383
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		767.395.386	971.841.383
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		965.378.085	1.050.982.771
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(224.628.824.981)	(176.569.682.663)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(224.628.824.981)	(176.569.682.663)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	1.444.031.040.202	1.342.991.582.367
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(224.628.824.981)	(176.569.682.663)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(594.800.693)	(1.179.267.311)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		(1.924.000)	(5.512.500)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(592.876.693)	(1.174.029.811)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	275.000
JUMLAH		(594.800.693)	(1.179.267.311)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	235.288.928.437	278.788.407.809
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		10.065.302.763	101.039.457.835
EKUITAS AKHIR	E.5	1.454.096.342.965	1.444.031.040.202

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak

lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparaturnya Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			3	3	-	-	6

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Pendapatan Lain-lain

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

Selama periode Tahun Anggaran 2022, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.047.500.000	1.047.500.000
Pendapatan Lain-lain		-
Jumlah Pendapatan	1.047.500.000	1.047.500.000
Belanja		
Belanja Pegawai	32.635.071.000	34.211.419.000
Belanja Barang	246.068.069.000	171.568.647.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	5.479.000.000	23.657.100.000
Jumlah Belanja	284.182.140.000	229.437.166.000

Realisasi

Pendapatan

*Rp3.152.919.280,
00*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.152.919.280,00 atau mencapai 301% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.047.500.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	60.000.000	378.109.671	630,18
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	987.500.000	596.600.000	60,42
Pendapatan Denda	-	376.395.450	0
Pendapatan Lain-lain	-	1.801.814.159	0
Jumlah	1.047.500.000	3.152.919.280	300,99

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 31,90% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2021. Hal ini disebabkan karena penerimaan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya serta pendapatan lain-lain atas pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	378.109.671	143.857.359	162,84
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	596.600.000	987.500.000	(39,58)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	-
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda	376.395.450	33.972.507	1.007,94
Pendapatan Lain-lain	1.801.814.159	1.225.068.521	47,08
Jumlah	3.152.919.280	2.390.398.387	31,90

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mengalami penurunan dibandingkan TA. 2021 yang disebabkan adanya perubahan tarif dari Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Metode Terpadu. Rincian Realisasi Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) sebesar Rp378.109.671,00.
 - Terdapat realisasi akun (425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.313.566,00 pada Satker BPSDM berupa lelang 2 paket inventaris kantor.

- Terdapat realisasi akun (425129) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp157.669.133,00 yaitu berupa:
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp2.200.000,00 berupa penjualan bongkaran gedung.
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp155.469.133,00 berupa pendapatan atas lelang kendaraan satu unit mobil merk isuzu elf tahun 2003 senilai Rp31.234.567,00, satu unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel Rp61.999.999,00, satu unit mobil merk Mitsubishi Ambulance Rp31.000.000,00, dan sebesar Isuzu Elf tahun 2004 Rp31.234.567,00.
 - Terdapat realisasi akun (425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp180.126.972,00 yaitu berupa :
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp178.344.400,00 terdiri dari sewa auditorium sebesar Rp10.566.000,00; sewa rumah dinas sebesar Rp2.955.400,00; sewa ruang mesin ATM sebesar Rp57.000.000,00; sewa kantin sebesar Rp18.000.000,00; sewa gudang gypsum sebesar Rp50.000.000,00; sewa asrama sebesar Rp14.317.000,00; sewa ruang kelas sebesar Rp1.948.000,00; dan sewa Flat sebesar Rp14.432.000,00
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp1.042.572,00 pendapatan atas sewa rumah dinas.
 - c. Satker Badiklat Jateng sebesar Rp740.000,00 berupa sewa rumah dinas.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254) sebesar Rp596.600.000,00
- Terdapat realisasi akun (425421) Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp596.600.000,00 yaitu berupa Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat Perancang peraturan Perundang- Undangan satu (1) angkatan 25 orang.
3. Pendapatan Denda (4258) sebesar Rp376.395.450,00 yang merupakan realisasi akun (425811) Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang terdiri dari :
- Satker Poltekip sebesar Rp8.689.796,00 berupa pengadaan atas pengembangan aplikasi SALTO,

- Satker Badiklat Sulut sebesar Rp367.705.654,00 berupa pendapatan denda atas jaminan pelaksanaan pembangunan gedung.
4. Pendapatan Lain-Lain (4259) sebesar Rp1.801.814.159,00
- Terdapat realisasi akun (425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp106.868.503,00 yang terdiri dari :
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp4.162.189,00 berupa Pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan September 2021 a.n. Nur Afdin, S.Hum Pegawai BPSDM Hukum.
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp102.704.830,00 berupa Pengembalian atas temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal terhadap pembayaran tunjangan kinerja a.n. Sohirin dikarenakan statusnya sedang melaksanakan tugas belajar.
 - c. Satker Poltekip sebesar Rp1.250,00 berupa pembulatan gaji.
 - d. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp234,00 berupa pembulatan gaji.
 - Terdapat realisasi akun (425912) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.566.660,00 pada Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
 - Terdapat realisasi akun (425913) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.686.378.996,00 yang terdiri dari :
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp518.437.472,00 berupa :
 - I. Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Infrastruktur Parkir Landscape dan *Drop Off* Gedung Kelas POLTEKIM oleh PT. Jumba Jao Jaya Rp12.879.763,00;
 - II. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Akses Internet pada BPSDM Hukum dan HAM Rp51.372.727,00 (a. Rp9.036.363,23 pekerjaan di BPSDM Hukum dan HAM, b. Rp42.336.363,64 pekerjaan di POLITEKNIK Tangerang);
 - III. Setoran Temuan BPK Rp454.184.982,00 (1.Kekurangan Vol Pekerjaan Gedung Auditorium Rp348.927.215,62 , No.2. Gedung Olahraga Rp105.257.766,09.

b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp1.167.941.524,00 berupa :

- I. Klaim jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran KDP Rp1.133.731.524,00;
- II. Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas komponen biaya langsung nonkomponen Rp27.800.000,00.

B.2. BELANJA

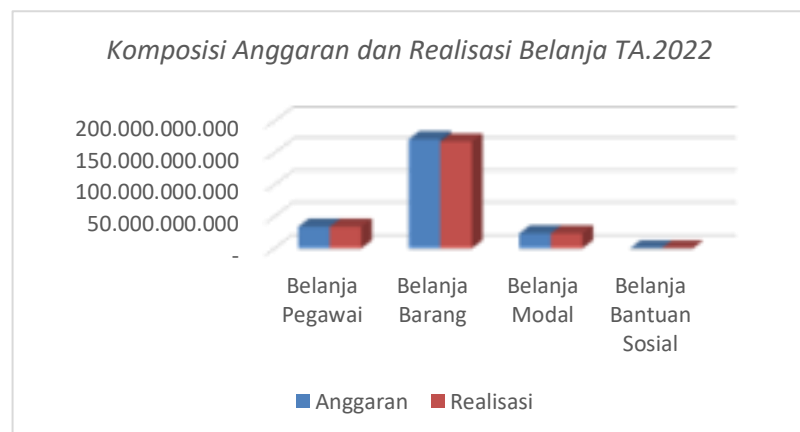
Realisasi Belanja
Rp223.990.194.
502,00

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp223.990.194.502,00 atau 97.63% dari anggaran belanja sebesar Rp229.437.166.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN	TA 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	34.211.419.000	34.052.799.449	99,54
Belanja Barang	171.568.647.000	167.745.308.046	97,77
Belanja Modal	23.657.100.000	23.412.400.003	98,97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	229.437.166.000	225.210.507.498	98,16
Pengembalian Belanja		(1.220.312.996)	-
Total Belanja	229.437.166.000	223.990.194.502	97,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Semester II Tahun Anggaran 2021, Realisasi Belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 19.21%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran belanja Barang BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan pelatihan dan pendidikan masih dilaksanakan secara

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta diklat dan para siswa dan siswi Taruna Politeknik.

Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	33.754.872.381	34.020.333.152	(0,78)
Belanja Barang	166.822.922.118	124.595.754.966	33,89
Belanja Modal	23.412.400.003	118.625.263.099	(80,26)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	223.990.194.502	277.241.351.217	(19,21)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp25.349.685.716
,00

Realisasi Belanja Pegawai Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.754.872.381,00 dan Rp34.020.333.152,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Semester II Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 0.78% dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	32.517.174.449	32.168.675.618	1,08
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	1.535.625.000	1.860.867.000,00	(17,48)
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	34.052.799.449	34.029.542.618	0,07
Pengembalian Belanja Pegawai	(297.927.068)	(9.209.466)	3.135,01
Jumlah Belanja	33.754.872.381	34.020.333.152	(0,78)

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2022

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21.987.293.000	21.934.681.216	-	21.934.681.216	99,76
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	439.000	344.151	3.688	340.463	78,39
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.392.110.000	1.385.518.914	1.170.450	1.384.348.464	99,53
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	370.367.000	365.551.766	-	365.551.766	98,70
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	897.395.000	887.115.000	287.100.120	600.014.880	98,85
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.504.291.000	2.502.230.000	185.050	2.502.044.950	99,92
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	152.000.000	149.766.042	-	149.766.042	98,53
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.137.174.000	1.130.331.360	217.260	1.130.114.100	99,40
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.644.795.000	3.579.876.000	-	3.579.876.000	98,22
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	584.486.000	581.760.000	9.250.500	572.509.500	99,53
512211	Belanja Uang Lembur	1.541.069.000	1.535.625.000	-	1.535.625.000	99,65
		34.211.419.000	34.052.799.449	297.927.068	33.754.872.381	99,54

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 31 Desember TA 2022 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp297.927.068,00 dengan rincian:

- Satker BPSDM sebesar Rp296.352.863,00 atas pembulatan gaji pegawai sebesar Rp2.243,00; pengembalian tunjangan struktural PNS sebesar Rp287.100.120,00; dan pengembalian tunjangan umum PNS sebesar Rp9.250.000,00.
- Satker Poltekip sebesar Rp220,00 atas pengembalian pembulatan gaji PNS.
- Satker Badiklat Kepri sebesar Rp186.275,00 atas belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp1.225,00 dan pengembalian tunjangan fungsional PNS sebesar Rp185.050,00.
- Satker Jawa Tengah sebesar Rp1.387.710,00 atas pengembalian belanja tunjangan suami/istri PNS sebesar Rp1.170.450,00 dan pengembalian belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp217.260,00.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp166.822.922.
118,00

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2021 dan Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp166.822.922.118,00 dan Rp124.595.754.966,00.

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 33.89% dari Semester II TA 2021. Hal ini

disebabkan terjadinya penambahan anggaran Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Semester II Tahun Anggaran 2021 dikarena terkendala waktu pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di masa pandemik berubah/mundur dari jadwal sehingga dilakukan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2022 dan 2021*

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	18.665.306.052	19.445.903.977	(4,01)
Belanja Barang Non Operasional	60.707.548.738	38.677.857.728	56,96
Belanja Persediaan	2.379.491.248	1.592.248.347	49,44
Belanja Jasa	45.414.021.533	36.394.997.040	24,78
Belanja Pemeliharaan	16.585.142.881	12.268.358.142	35,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.993.797.594	17.041.383.473	40,80
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	167.745.308.046	125.420.748.707	33,75
Pengembalian Belanja	(922.385.928)	(824.993.741)	
Jumlah Belanja	166.822.922.118	124.595.754.966	33,89

Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2022

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	18.952.239.000	18.665.306.052	4.200.000	18.661.106.052	98,49
5212	Belanja Barang Non Operasional	61.681.854.000	60.707.548.738	34.609.600	60.672.939.138	98,42
5218	Belanja Barang Persediaan	2.401.314.000	2.379.491.248	-	2.379.491.248	99,09
5221	Belanja Jasa	46.383.425.000	45.414.021.533	211.295.716	45.202.725.817	97,91
5231	Belanja Pemeliharaan	16.883.880.000	16.585.142.881	-	16.585.142.881	98,23
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	25.265.935.000	23.993.797.594	672.280.612	23.321.516.982	94,97
		171.568.647.000	167.745.308.046	922.385.928	166.822.922.118	97,77

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat pengembalian sebesar Rp922.385.928,00 yang terdiri dari :

1. Pengembalian belanja akun (5211) Belanja Barang Operasional sebesar Rp4.200.000 terdapat pada satker POLTEKIM atas uang pulsa pegawai bulan April;
2. Pengembalian belanja akun (5212) Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp34.609.600,00 terdiri dari :
 - Pengembalian akun Belanja Bahan (521211) sebesar Rp1.348.000,00 terdapat pada satker Poltekkip atas

Perjalanan Dinas Prodi Poltekip.

- Pengembalian akun Belanja Honor Output Kegiatan (521213) sebesar Rp18.843.000,00 pada satker BPSDM atas pengembalian belanja honor pengajar/ narasumber pelatihan.
 - Pengembalian akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp7.650.000,00 pada Satker Poltekip berupa pengembalian belanja perjalanan Dinas Kegiatan 2022.
 - Pengembalian akun Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi (521241) sebesar Rp7.128.600,00 pada satker BPSDM atas pengembalian biaya komunikasi peserta pelatihan.
3. Pengembalian belanja akun (5221) Belanja Jasa sebesar Rp211.295.716,00 terdiri dari
- Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (522119) sebesar Rp129.297.451,00 pada satker BPSDM atas Pengembalian Denda dan Restitusi SLA Layanan Internet BPSDM Hukum dan Ham Gandul Periode Januari-September 2022 sebesar Rp36.662.574,00; Pengembalian Denda dan Restitusi SLA Layanan Internet BPSDM Hukum dan Ham Gandul Periode Januari sd September 2022 sebesar Rp92.634.877,00.
 - Pengembalian Belanja Sewa (522141) sebesar Rp26.643.613,00 pada Satker Poltekim berupa pengembalian belanja sewa kendaraan monil operasional kantor.
 - Pengembalian Jasa Profesi (522151) sebesar Rp52.702.652,00 pada Satker BPSDM atas Belanja Jasa Profesi (522151) berupa pengembalian honor pengajar dan diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM.
 - Pengembalian Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp2.652.000 pada Satker BPSDM berupa Pengembalian Biaya Swab Antigen Peserta Pelatihan.

4. Pengembalian belanja akun (5241) Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp672.280.612,00 terdiri dari :
 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) sebesar Rp586.182.629,00 terdapat pada
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp491.595.346,00.
 - b. Satker Poltekip sebesar Rp93.861.283,00.
 - c. Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp726.000,00 atas temuan hasil audit Inspektorat Jenderal berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) sebesar Rp12.900.000,00 terdiri dari :
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp300.000,00
 - b. Satker Poltekip sebesar Rp12.600.00,00
 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) sebesar Rp2.800.000,00 pada Satker BPSDM.
 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) sebesar Rp70.397.983 pada satker BPSDM.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp23.412.400.003,
00*

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.412.400.003,00 dan Rp118.625.263.099,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Semester II Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 80.26% dibandingkan Semester II Tahun Anggaran TA 2021 hal ini dikarenakan pengurangan atas pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, pengadaan inventaris kantor serta pembelian Aplikasi yang ada di masing-masing satker BPSDM Hukum dan HAM.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.138.078.489	15.920.411.306	(17,48)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.361.233.914	102.007.700.793	(90,82)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	913.087.600	708.256.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	23.412.400.003	118.636.368.099	-80,27
Pengembalian	-	(11.105.000)	-
Jumlah Belanja	23.412.400.003	118.625.263.099	-80,26

Rincian Realisasi Belanja Barang Modal per 31 Desember 2022

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.290.137.000	13.138.078.489	-	13.138.078.489	98,86
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.449.305.000	9.361.233.914	-	9.361.233.914	99,07
5361	Belanja Modal Lainnya	917.658.000	913.087.600	-	913.087.600	99,50
		23.657.100.000	23.412.400.003	0	23.412.400.003	98,97

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

TA 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp13.138.078.
489,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp13.138.078.489,00 mengalami penurunan sebesar 17,48% bila dibandingkan dengan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.920.411.306,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris

kantor serta penambahan dan peremajaan peralatan dan mesin yang sudah rusak untuk menunjang kinerja pegawai.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2022 dan 2021*

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.138.078.489	15.869.848.306	-17,21
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	50.563.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	13.138.078.489	15.920.411.306	-17,48
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	13.138.078.489	15.920.411.306	-17,48

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp9.361.233.914
,00*

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.361.233.914,00 dan Rp101.996.595.793,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.999.335.914	101.640.554.566	(91)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	361.898.000	367.146.227	(1)
Jumlah Belanja Kotor	9.361.233.914	102.007.700.793	-90,82
Pengembalian Belanja Modal	-	(11.105.000,00)	-
Jumlah Belanja	9.361.233.914	101.996.595.793	-90,82

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2022 mengalami penurunan sebesar 90.81% dikarenakan telah selesainya pembangunan dan renovasi Gedung dan Bangunan dari satker BPSDM Hukum dan HAM atas pembangunan Gedung Olahraga dan Auditorium Politeknik. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dari pembangunan gedung olahraga dan gedung genset pada satker BPSDM.

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.087.407.000	8.999.335.914	-	8.999.335.914	99,03
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Belanja	-	-	-	-	-
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	361.898.000	361.898.000	-	361.898.000	100,00
		9.449.305.000	9.361.233.914	0	9.361.233.914	99,07

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya
Rp913.087.600,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp913.087.600,00 dan Rp386.379.600,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 136.32% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh pengadaan software untuk program dan pelatihan yang ada di satuan kerja lingkup Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja <i>Software</i>	913.087.600	386.379.600	136,32
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	913.087.600	386.379.600	136,32
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	913.087.600	386.379.600	136,32

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan lain-lain yaitu :

- Satker BPSDM sebesar Rp386.379.600,00 merupakan realisasi berupa pembelian *software* modul pengembangan Rumah Belajar Kemenkumham yang terdiri dari:
 - a. Belanja Penambahan Fitur pada Software Aplikasi Rumah Belajar Rp197.079.600,00
 - b. Koreksi pencatatan nilai bertambah terhadap pengembangan fitur rumah belajar sebesar Rp198.300.000,00.
- Satker Poltekip sebesar Rp447.658.000,00 berupa pengembangan aplikasi SALTO
- Satker Badiklat Sulut sebesar Rp29.300.000,00 berupa belanja *software* aplikasi Sitarsius untuk penyelenggaraan diklat.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp49.750.000,00 berupa *software* komputer.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial
Rp0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II Tahun Anggaran 2022 dan Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2022 dan 2021*

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Rekening Bank	-	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2022 dan TA 2021*

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2022 dan 2021*

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,00

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang PNB
TA 2022 dan 2021*

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Piutang PNB	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	-	-
Jumlah	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR*
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2022 dan 2021*

No	Nama	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar Semester II TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-	-	-

C.8 Beban Dibayar di Muka

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp0,00

Saldo Beban Dibayar di Muka 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.034.418.773,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021

JENIS	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pembayaran Internet	-	-
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-	1.034.418.773
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	1.034.418.773

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2022 dan 2021

JENIS	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp476.702.271,00*

Nilai Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp476.702.271,00 dan Rp434.783.170,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

JENIS	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Barang Konsumsi	396.134.911	382.865.570
Barang untuk Pemeliharaan	76.167.860	51.917.600
Amunisi	4.400.000	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	476.702.771	434.783.170

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang

mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Non Lancar
Rp0,00*

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

*Tanah
Rp1.089.000.068.
000,00*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.089.000.068.000,00. Aset Tetap Tanah terdiri dari :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m2 terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin*
*Rp116.512.418.
038,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp116.512.418.038,00 dan Rp92.877.000.717,00 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp 92.877.000.717
Mutasi tambah:	Rp 29.170.584.287
Pembelian	Rp 1.261.353.645
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Mutasi kurang:	Rp 5.535.166.966
Transfer keluar	Rp -
Reklasifikasi Aset	Rp -
Penghapusan	Rp 30.028.860
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 116.512.418.038
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp (73.255.577.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp 43.256.840.913

Mutasi bertambah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp23.432.316.676,00
- Satker Poltekim sebesar Rp1.544.244.796,00
- Satker Poltekip sebesar Rp1.278.445.000,00
- Satker Badiklat Kepulauan Riau senilai Rp1.164.398.000,00
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp498.509.700,00
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp1.252.670.115,00

Mutasi kurang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM sebesar Rp4.538.276.000,00 berupa Penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 2 unit Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang) senilai Rp685.746.000,00; transfer keluar 1 unit minibus ke Lapas Wonogiri dan 1 unit minibus ke Rutan Bangli senilai Rp512.315.000,00; reklasifikasi keluar Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 6 unit station wagon senilai Rp2.893.600.000,00; Koreksi Pencatatan Alat Bengkel Tak Bermesin berupa 1 unit Mesin Pompa Air PMK senilai Rp14.985.000,00; Penghentian penggunaan Alat Rumah Tangga berupa 4 unit Mesin Cuci, 30 Unit AC Split, 1 Unit Seterika, dan 1 Unit Mesin Pengering Pakaian senilai Rp269.380.000,00; reklasifikasi keluar Komputer Unit berupa 11 unit P.C Workstation senilai Rp162.500.000,00.
- Satker Poltekim sebesar Rp675.558.646,00 berupa transfer keluar Alat Angkutan Darat Bermotor.
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp271.660.000,00 terdapat :
 - a. Transfer keluar 1 Unit Kendaraan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp.170.560.000, Barang Milik Negara tersebut ditransfer ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.
 - b. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp101.100.000,00 yang terdiri dari Penyemprot Mesin (Power Sprayer) sebanyak 1 Unit senilai Rp.1.350.000,00, Meja Kerja Kayu sebanyak 13 Unit senilai Rp.45.655.000,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 17 Unit senilai Rp.30.285.000,00, A.C. Split sebanyak 2 Unit senilai Rp. 10.560.000,00, dan Scanner sebanyak 1 Unit senilai Rp.13.250.000,00.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp19.643.460,00 peralatan dan mesin dalam kondisi rusak dan dihentikan penggunaannya berupa 6 unit meja kerja besi senilai Rp3.243.300,00 dan 1 unit PC senilai Rp16.400.160,00.

- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp30.028.860,00 berupa penghentian Personal Komputer Lainnya senilai Rp19.218.000,00 dan Komputer Unit Lainnya senilai Rp10.810.860,00 yang sudah dalam kondisi rusak berat.

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp353.165.757.
229,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp353.165.757.229,00 dan Rp335.299.814.950,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	335.299.814.950
Mutasi tambah:	60.049.567.765
Transfer Masuk	12.911.991.663
Pengembangan Nilai Aset	47.137.576.102
Mutasi kurang:	42.183.625.486
Reklasifikasi keluar	700.329.935
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	41.483.295.551
Saldo per 31 Desember 2022	353.165.757.229
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(41.872.663.554)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	311.293.093.675

Terdapat Nilai Mutasi Tambah sebesar Rp60.049.567.765,00 terdiri atas :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp43.029.958.486,00 atas Penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa 1 unit Bangunan Gedung Olahraga Tertutup permanen, 1 unit Bangunan Rumah Genset, dan 2 unit Flat/Rumah Susun Permanen senilai Rp30.117.966.823,00 dan Transfer Masuk berupa Flat/Rumah Susun Permanen senilai Rp12.911.991.663,00.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp8.095.452.558,00 merupakan pembangunan gedung pada Badiklat Jawa Tengah.
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp8.924.156.721,00 merupakan pembangunan gedung asrama permanen Rp4.210.096.761, gedung pendidikan permanen Rp 3.833.930.025, dan pagar permanen Rp359.600.000, serta gedung kantor lainnya Rp520.529.935,00.

Terdapat Nilai Mutasi Kurang terdiri dari:

- Satker BPSDM sebesar Rp41.483.295.551,00 atas koreksi Bangunan Gedung Pertemuan Permanen dari hasil Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 yang terletak di Tangerang

(Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang) tersebut dirubah menjadi beberapa aset tetap.

- Satker Badiklat Sulawesi Utara mencatat reklasifikasi keluar berupa pagar permanen sebesar Rp179.800.000,00 dan gedung kantor lainnya Rp520.529.935,00.

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp12.359.677.
154,00*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.359.677.154,00 dan Rp9.395.644.993,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	9.395.644.993
Mutasi tambah:	2.964.032.161
Pembelian	-
Koreksi pencatatan aset	2.964.032.161
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2021	12.359.677.154
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(5.998.401.955)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	6.361.275.199

Mutasi Tambah sebesar Rp2.964.032.161,00 terdapat pada satker BPSDM berupa renovasi jalan khusus komplek yang berada di Tangerang yang menambah nilai jalan.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp3.074.558
.997,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp3.074.558.997,00 dan Rp2.972.643.997,00.

Saldo per 31 Desember 2021	2.972.643.997
Mutasi tambah:	101.915.000
Transfer Masuk	101.915.000
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 31 Desember 2022	3.074.558.997
Akumulasi Penyusutan s.d.30 September 2022	(1.537.500.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.537.058.997

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, sebesar Rp2.972.643.997,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.351.026.622,00 berupa monografi 4.777 buah Rp717.668.957,00, Referensi 2 buah Rp108.869.635,00, buku lainnya 794 buah Rp452.788.030,00, naskah/manuskrip berbahan kertas 1 buah Rp48.220.000,00, alat musik modern/band 1 buah Rp19.480.000,00 dan pahatan logam 1 buah Rp.5.000.000,00.
- Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.867.743.575,- berupa monografi sebanyak 1.653 buah Rp51.093.575,00 dan alat musik modern/band sebanyak 108 buah Rp816.650.000,00.
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.753.873.800,- berupa monografi sebanyak 1480 buah Rp51.503.800,00 dan alat musik modern/band 226 6 buah Rp702.370.000,00.

Mutasi tambah sebesar Rp101.915.000,00 terdapat pada Satker Poltekim berupa pembelian alat musik.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp122.664.142.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp122.664.142.634,00 dan Rp96.521.081.709,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

634,00

yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	116.512.418.038	73.255.577.125	43.256.840.913
2	Gedung dan Bangunan	35.316.757.229	41.872.663.554	(6.555.906.325)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.359.677.154	5.998.401.955	6.361.275.199
4	Aset Tetap Lainnya	3.074.558.997	1.537.500.000	1.537.058.997
Total		167.263.411.418	122.664.142.634	44.599.268.784

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp3.143.147.433,
00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.143.147.433,00 dan Rp2.537.559.833,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 3.143.147.433
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		Rp 3.143.147.433

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 2.537.559.833
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	Rp 655.337.600
Pembelian	Rp 49.750.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 416.287.600
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi keluar	Rp 189.300.000
	Rp 49.750.000
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 3.143.147.433
Amortisasi s.d 31 Desember 2022	Rp (1.863.248.421)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp 1.279.899.012

Mutasi tambah sebesar Rp773.837.600,00 terdapat pada :

- Satker BPSDM sebesar Rp386.379.600,00 berupa
 - a. pembelian 2 unit software computer senilai Rp197.079.600 berupa Penambahan Fitur Rumah Belajar.
 - b. koreksi pencatatan nilai bertambah berupa Pengembangan Fitur Rumah Belajar sebesar Rp189.300.000,00.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp99.500.000,00 berupa pembelian software komputer sebesar Rp49.750.000,00 dan reklasifikasi masuk aset tidak berwujud lainnya menjadi software komputer sebesar Rp49.750.000,00.
- Satker Poltekop Rp140.158.000,00 berupa pengembangan aplikasi SALTO.
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp29.300.000,00 berupa Aplikasi Sitarsius untuk penyelenggara diklat.

Mutasi kurang Rp49.750.000,00 terdiri dari :

- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp49.750.000,00 karena reklasifikasi keluar ATB.

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp5.188.629.286,
00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp5.188.629.286,00 dan Rp8.310.389.928,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset TA 2022 dan 2021

Jenis Aset	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	5.188.629.286	8.310.389.928
Jumlah Belanja	5.188.629.286	8.310.389.928

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	8.310.389.928
Mutasi tambah:	390.123.460
Reklasifikasi masuk	101.100.000
Penghentian Aset dr penggunaan	289.023.460
Mutasi kurang:	3.511.884.102
Pencatatan penghapusan	2.826.138.102
Penghapusan BMN	685.746.000
Saldo per 31 Desember 2022	5.188.629.286
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(3.486.989.356)

Mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp120.743.460,00 terdiri atas :

- Satker BPSDM sebesar Rp269.380.000 penghentian aset dari penggunaan berupa peralatan dan mesin.
- Satker Badiklat Kepri sebesar Rp101.100.000,00 atas reklasifikasi 1 unit penyemprot mesin Rp1.350.000,00; 13 unit Meja Kerja Kayu Rp45.655.000,00; 17 unit Kursi Besi/Metal Rp30.285.000,00; A.C Split senilai Rp10.560.000,00; dan 1 unit scanner Rp13.250.000,00.
- Satker Badiklat Jateng sebesar Rp19.643.460,00 terdiri atas pembelian 6 unit Meja Kerja Kayu Rp3.243.30,00 dan 1 unit PC unit sebesar Rp16.400.160,00.

Mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp1.114.630.000,00 terdiri atas:

- Satker BPSDM sebesar Rp2.237.891.702,00 atas penghapusan 2 unit minibus senilai Rp685.746.000,00 dan pencatatan barang yang mau dihapuskan senilai Rp1.552.145.702,00.
- Satker Poltekim sebesar Rp1.273.992.400,00 atas penghapusan BMN 3 unit microbus senilai Rp730.800.000,00; 3 unit minibus penumpang 14 orang senilai Rp345.692.400,00; dan 1 unit Jeep senilai Rp197.500.000,00.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp5.710.237.777,
00*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.710.237.777,00 dan Rp8.192.449.669,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	3.143.147.433	1.863.248.421	1.279.899.012
2	ATB Lainnya	118.500.000	-	118.500.000
Jumlah		3.261.647.433	1.863.248.421	1.398.399.012
B	Aset Lainnya	5.188.629.286	3.846.989.356	1.341.639.930
Jumlah		5.188.629.286	3.846.989.356	1.341.639.930
Total		8.450.276.719	5.710.237.777	2.740.038.942

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember

KPPN
Rp0,00

2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp349.715.146,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp349.715.146,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa belanja listrik, belanja air dan belanja telepon bulan Desember 2022 yang tagihannya diterima pada Januari 2023.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	349.715.146
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
Total		Rp 349.715.146

- Satker BPSDM sebesar Rp306.398.797,00 merupakan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) terdiri dari :
 - a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp304.590.233,00.
 - b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp914.064,00.
 - c. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran air 4 bulan yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp894.500,00.
- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp8.388.400,00 terdiri dari :

- a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran air bulan Desember 2022 yang dibayarkan bulan Januari 2023 sebesar Rp271.00,00.
- b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp6.846.700,00.
- c. Jurnal pengakuan utang atas tagihan internet bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp1.270.700,00.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp19.658.878,00 terdiri dari:
 - a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp19.446.578,00.
 - b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran air bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp212.300,00.
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp15.269.071,00 terdiri dari :
 - a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp9.527.671,00.
 - b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran wifi bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp5.741.400,00.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp100.520.386,00 dan Rp75.798.211,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka Semester II TA 2022

Uraian	Jumlah	Penjelasan
ALTRI	Rp 48.357.065	Jasa Sewa Gedung dan Bangunan ALTRI yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun
Bank Mandiri	Rp 52.163.321	Sewa tempat mesin ATM dan listrik ruangan
Badan Lainnya	Rp -	
Total	Rp 100.520.386	

*Beban yang Masih
harus Dibayar
Rp0,00*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2022 dan TA 2021

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

C.28 Ekuitas

*Ekuitas
Rp1.454.096.342.
965,00*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.454.096.342.965,00 dan Rp1.444.031.040.202,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp1.128.400.247,
00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.128.400.247,00 dan Rp1.061.438.630,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN	TA 2022	TA 2021
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	155.404.797	39.595.985
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	596.600.000	987.500.000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	376.395.450	33.972.507
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	370.138
Jumlah	Jumlah	1.128.400.247	1.061.438.630

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

- Pendapatan Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha sebesar Rp155.404.797,00 terdiri atas:
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp133.633.178,00
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp1.042.572,00
 - c. Satker Poltekip sebesar Rp19.989.047,00
 - d. Satker Badiklat Jateng Rp740.000,00
- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau pelatihan sebesar Rp596.600.000,00 pada satker BPSDM atas penyelenggaraan Diklat Perancang Peraturan Perundang-Undangan satu angkatan
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp376.395.450,00,00 terdiri atas :
 - a. Satker Poltekip sebesar Rp8.689.796,00
 - b. Satker Badiklat Solut Rp367.705.654,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp33.754.872.381
,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp33.754.872.381,00 dan Rp34.020.333.152,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

TA 2021 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021
Beban Gaji Pokok PNS	21.934.681.216	21.806.700.840
Beban Pembulatan Gaji PNS	344.151	347.450
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(3.688)	(4.366)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.385.518.914	1.404.245.448
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(1.170.450)	0
Beban Tunj. Anak PNS	365.551.766	355.178.798
Beban Tunj. Struktural PNS	887.115.000	955.210.000
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(287.100.120)	(1.620.000)
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.502.230.000	1.811.090.000
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(185.050)	0
Beban Tunj. PPh PNS	149.766.042	132.790.482
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(217.260)	0
Beban Tunj. Beras PNS	1.130.331.360	1.124.682.600
Beban Uang Makan PNS	3.579.876.000	3.973.745.000
Beban Tunjangan Umum PNS	581.760.000	604.685.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(9.250.500)	(7.585.100)
Beban Uang Lembur	1.535.625.000	1.860.867.000
Jumlah	33.754.872.381	34.020.333.152

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp3.096.062.207,
00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.096.062.207,00 dan Rp1.953.991.427,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

TA 2021 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.056.462.207	1.836.987.089	66,38
Beban Persediaan pita cukai, materai, dan leges	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	39.600.000	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	3.096.062.207	1.836.987.089	68,54

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp125.093.169.683,00

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp125.093.169.683,00 dan Rp94.190.195.817,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	13.946.536.418	11.875.090.917	17
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.902.310	18.298.380	(73)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.238.320.000	1.016.880.000	22
Beban Barang Operasional Lainnya	1.303.464.734	1.396.030.578	(7)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-	(4.725.000)	(100)
Pengembalian Beban Barang-Penanganan Pandemi Cov	(4.200.000)	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COV	2.172.082.590	5.139.604.102	(58)
Pengembalian Beban Bahan	(1.348.000)	(41.000)	3.188
Beban Bahan	17.646.975.659	5.300.748.705	233
Beban Honor Output Kegiatan	2.071.980.000	1.777.427.000	17
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(18.483.000)	(3.520.000)	425
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(7.650.000)	(35.595.000)	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	36.484.575.526	27.348.922.140	33
Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penang	(7.128.600)	(14.868.455)	-
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi C	4.474.017.553	4.250.759.883	5
Beban Langganan Listrik	3.618.644.865	1.946.491.705	86
Beban Langganan Telepon	16.530.860	31.141.398	(47)
Beban Langganan Air	8.174.750	5.049.175	62
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.805.490.937	3.312.304.337	45
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(129.297.451)	-	-
Beban Jasa Konsultan	69.870.000	-	-
Beban Sewa	6.099.316.919	4.659.437.180	-
Pengembalian Beban Sewa	(26.643.613)	-	-
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(52.702.652)	(334.168.953)	-
Beban Jasa Profesi	27.447.499.990	25.311.777.500	8
Beban Jasa Lainnya	750.150.000	502.507.545	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.948.058.358	626.288.200	-
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid	(2.652.000)	(3.663.000)	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	30.000.000	68.018.480	-
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	206.683.530	-	-
Jumlah	125.093.169.683	94.190.195.817	33

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp15.868.728.
321,00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.868.728.321,00 dan Rp11.939.285.152,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.826.954.247	8.162.210.526	45
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penan	-	-	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	(3.919.500)	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.362.498.298	2.950.401.415	14
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	679.275.776	830.592.711	-
Jumlah	15.868.728.321	11.939.285.152	33

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan Dinas
Rp23.321.516.
982,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.321.516.982,00 dan Rp16.616.890.640,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	17.459.684.304	14.765.235.145	18,25
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(586.182.629)	(406.540.633)	44,19
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.077.669.286	597.952.400	80,23
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(12.900.000)	(1.950.000)	561,54
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(2.800.000)	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	130.362.000	208.874.000	-37,59
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(70.397.983)	(16.002.200)	339,93
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.326.082.004	1.466.621.928	263,15
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid19	0	2.700.000	-100,00
Jumlah	23.321.516.982	16.616.890.640	40,35

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2021 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp25.588.253.739
,00*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp25.588.253.739,00 dan Rp19.961.407.876,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2021 dan TA 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 2022	Realisasi 2021	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.506.183.563	10.379.444.410	40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.257.207.066	8.273.395.143	12
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.147.669.952	851.266.737	35
Beban Penyusutan Irigasi	19.808.858	19.808.858	-
Beban Penyusutan Jaringan	10.156.250	10.156.250	-
Beban Amortisasi Software	558.299.623	371.963.686	50
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	88.928.427	55.372.792	61
Jumlah	25.588.253.739	19.961.407.876	28

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2021 dan TA 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

*Beban Lain-lain
Rp0,00*

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp767.395.386,
00*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp767.395.386,00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2022 dan TA 2021*

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	767.395.386	1.224.698.383	-37,34
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	252.857.000	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	767.395.386	971.841.383	-21,04

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang diperoleh sebesar Rp767.395.386,00 terdapat pada :

- a. Satker BPSDM sebesar Rp4.162.189,00 berupa Pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan September 2021 an Nur Afdin, S.Hum Pegawai BPSDM Hukum dan HAM. Pengembalian pembulatan tunjangan jabatan PNS bulan November 2021 a.n drg.Rahmah Pandini Nazif sebesar Rp589,00. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp518.437.472,00 berupa:

- I. Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Infrastruktur

Parkir Landscape dan *Drop Off* Gedung Kelas POLTEKIM oleh PT. Jumba Jao Jaya Rp12.879.763,00.

- II. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Akses Internet pada BPSDM Hukum dan HAM Rp51.372.727,00
(a. Rp9.036.363,23 pekerjaan di BPSDM Hukum dan HAM,
b. Rp42.336.363,64 pekerjaan di POLITEKNIK Tangerang)
- III. Setoran Temuan BPK Rp454.184.982,00 berupa Kekurangan Volum Pekerjaan Gedung Auditorium sebesar Rp348.927.215,62; Gedung Olahraga sebesar Rp105.257.766,09.

- b. Satker Poltekim sebesar Rp102.704.830,00 berupa Pengembalian atas temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal terhadap pembayaran tunjangan kinerja a.n. Sohirin dikarenakan statusnya sedang melaksanakan tugas belajar.
- c. Satker Poltekip sebesar Rp1.250,00 merupakan realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) berupa pembulatan gaji.
- d. Satker Badiklat Kepulauan Riau merupakan realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp8.566.660,00 atas temuan hasil audit Itjen.
- e. Satker Sulawesi Utara terdapat realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp234,00 berupa pembulatan gaji. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp133.522.751,00.

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa *Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2021*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp1.444.031.040.202,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.444.031.040.202,00 dan Rp1.342.991.582.367,00

Surplus/Defisit LO

Rp224.628.824.981,00

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp224.628.824.981,00 dan Rp176.569.682.663,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

Koreksi Reklasifikasi Aset
Rp1.924.000,00

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp1.924.000,00) dan (Rp5.512.500,00). Dari Satker BPSDM berupa selisih nilai persediaan menjadi aset atas laser pointer 4 unit.

Rincian Koreksi Reklasifikasi Aset per 31 Desember 2022

Jenis	Nilai Koreksi	Keterangan
Peralatan dan Mesin	Rp 1.924.000	rekas masuk atas peralatan dan mesin
Jumlah	Rp 1.924.000	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
(Rp592.876.693,00)

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp592.876.693,00) dan (Rp1.174.547.065,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah jalan khusus kompleks, dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
per 31 Desember 2022**

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT	PENJELASAN
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	889.209.649	-	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Khusus Kompleks
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41.483.295.551	-	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	28.070.000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	414.832.956	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	75.379.700	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	3.797.558.427	Saldo Awal LCD Monitor
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	49.000.000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	161.160.000	Saldo Awal CCTV - Camera Control Television System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	1.250.327.100	Saldo Awal Bangunan Rumah Genset
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	28.867.639.723	Saldo Awal Gedung Olah Raga Tetutup Permanen
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	73.685.040	Saldo Awal LCD Monitor
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	100.160.000	Saldo Awal Pompa Lumpur
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	49.300.000	Saldo Awal Sound System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	138.035.000	Saldo Awal CCTV - Camera Control Television System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	52.290.000	Saldo Awal Sound System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	24.375.000	Saldo Awal Televisi
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	3.764.423.400	Saldo Awal Sound System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	38.500.000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	49.360.000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	2.964.032.161	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Khusus Kompleks
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	28.939.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Pengering Pakaian
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	112.115.000	-	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	112.115.000	-	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	112.115.000	-	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	112.115.000	-	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	101.600.000	-	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	101.600.000	-	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	112.115.000	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	112.115.000	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	101.600.000	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	101.600.000	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	112.115.000	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	112.115.000	Tetap Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	76.370.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Cuci
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	28.939.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Pengering Pakaian
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	11.281.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Seterika
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	152.790.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan A.C. Split
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	28.939.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Pengering Pakaian
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	11.281.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Seterika
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	152.790.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan A.C. Split
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	76.370.000	-	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Cuci
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	14.985.000	Jurnal Koreksi atas BAST yang tidak diproses ke SP2D
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	11.281.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Seterika
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	28.939.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Pengering Pakaian
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	76.370.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Cuci
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	152.790.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan A.C. Split
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	152.790.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan A.C. Split
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	11.281.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Seterika
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	76.370.000	Penghentiaa Aset Dari Penggunaan Mesin Cuci
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.985.000	-	Koreksi Pencatatan Mesin Pompa air PMK
TOTAL		43.577.910.200	43.103.533.507	474.376.693

*Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
per 31 Desember 2022*

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT	PENJELASAN
391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	118.500.000	-	Website 3 program studi
TOTAL		118.500.000	-	118.500.000

E.3.6 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
Rp0,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp235.288.928.
437,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp235.288.928.437,00 dan Rp278.788.407.809,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(3.152.919.280)
Ditagihkan ke Entitas Lain	223.990.194.502
Transfer Masuk	14.352.153.215
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	99.500.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	235.288.928.437

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

<i>DDEL/DKEL</i> <i>(Rp3.152.919.280</i> <i>,00)/</i> <i>Rp223.990.194.</i> <i>502,00</i>	Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp3.152.919.280,00) sedangkan DKEL sebesar Rp223.990.194.502,00.
---	--

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

<i>Transfer</i> <i>Masuk/Transfer</i> <i>Keluar</i> <i>Rp14.352.153.215</i> <i>,00</i>	Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp14.352.153.215,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0,00.
--	--

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp99.500.000,00 berupa 1 unit Golfcar.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp0,00

E.5 Ekuitas Akhir

<i>Ekuitas Akhir</i> <i>Rp1.454.214.842.</i> <i>965,00</i>	Nilai ekuitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.454.096.342.965,00 dan Rp1.444.031.040.202,00.
--	--

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp349.715.146,00 merupakan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) terdiri dari :
 - Satker BPSDM sebesar Rp306.398.797,00 merupakan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) terdiri dari :
 - a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp304.590.233,00.
 - b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp914.064,00.
 - c. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran air 4 bulan yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp894.500,00.
 - Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp8.388.400,00 terdiri dari :
 - a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran air bulan Desember 2022 yang dibayarkan bulan Januari 2023 sebesar Rp271.00,00.
 - b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp6.846.700,00.
 - c. Jurnal pengakuan utang atas tagihan internet bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp1.270.700,00.
 - Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp19.658.878,00 terdiri dari :
 - a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp19.446.578,00.
 - b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran air bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp212.300,00.
 - Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp15.269.071,00 terdiri dari :
 - a. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran listrik bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp9.527.671,00
 - b. Jurnal pengakuan utang atas pembayaran wifi bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp5.741.400,00.
2. Realisasi Belanja Modal Lainnya (536111) Rp913.087.600,00 terdapat pada :

- Satker BPSDM sebesar Rp386.379.600,00 merupakan realisasi berupa pembelian *software* modul pengembangan Rumah Belajar Kemenkumham yang terdiri dari:
 - c. Belanja Penambahan Fitur pada Software Aplikasi Rumah Belajar Rp197.079.600,00
 - d. Koreksi pencatatan nilai bertambah terhadap pengembangan fitur rumah belajar sebesar Rp198.300.000,00.
 - Satker Poltekip sebesar Rp447.658.000,00 berupa pengembangan aplikasi SALTO
 - Satker Badiklat Sulut sebesar Rp29.300.000,00 berupa belanja *software* aplikasi Sitarsius untuk penyelenggaraan diklat.
 - Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp49.750.000,00 berupa *software* komputer.
3. Tindak lanjut temuan Itjen/BPK
- a. Barang Tidak Ditemukan berupa Gedung Perpustakaan dan Zitting Plat masih menunggu reviu Inspektorat Jenderal, dimana hasil reviu Inspektorat Jenderal tersebut digunakan sebagai salah satu dokumen dalam usulan penghapusan Barang Tidak Ditemukan.
 - b. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m2 akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp. 25.248.900.000.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
- a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
 - b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
 - c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
 - d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan

sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2021.

II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	TA 2022		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52	BELANJA BARANG			
5211	Belanja Barang Operasional			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	2.183.086.000	2.172.085.590	99,50
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	2.183.086.000	2.172.085.590	99,50
5212	Belanja Barang Non Operasional			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	4.802.153.000	4.474.017.553	93,17
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	4.802.153.000	4.474.017.553	93,17
5218	Belanja Barang Persediaan			
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	690.820.000	689.479.829	99,81
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	690.820.000	689.479.829	99,81
5221	Belanja Jasa			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.093.938.000	2.948.058.358	95,28
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	3.093.938.000	2.948.058.358	95,28
	JUMLAH BELANJA	10.769.997.000	10.283.641.330	95,48

- Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) sebesar Rp2.172.085.590,00 berasal dari Satker BPSPDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.036.772.389,00 satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp768.178.275,00, Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp270.885.408,00, satker Badiklat Kepulauan Riau Rp2.474.700,00, satker Jawa Tengah sebesar Rp3.680.343,00 dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp85.891.475,00. Terdapat pengembalian sebesar Rp4.200.000,00 pada satker Poltekim.
- Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) sebesar Rp4.474.017.553,00 berasal dari satker BPSPDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.039.115.818,00, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp900.100.000, satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp1.536.491.818,00, satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp387.204.000,00, satker Badiklat Jawa Tengah Rp261.083.135,00 dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp342.894.182,00. Terdapat pengembalian sebesar Rp7.128.600,00 pada satker BPSPDM.
- Realisasi Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19 (521841) sebesar Rp689.479.829,00 berasal dari satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp59.455.000,00 Politeknik Ilmu Pemasarakatan senilai Rp509.710.479,00, satker Balai Diklat Kepulauan Riau senilai

Rp36.447.500,00, dan Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp83.866.850,00

- Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp2.948.058.358,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.331.180.158,00 Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp779.295.000,00, Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp737.099.000,00 satker Badiklat Kepulauan Riau Rp39.728.000,00, satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp29.560.000,00 dan satker Balai Diklat Sulawesi Utara Rp28.544.200,00. Terdapat pengembalian sebesar Rp2.652.000,00 dari satker BPSDM.

III. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemic Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data 20/02/23 7:15 AM
Tgl. Cetak 20/02/2023 9:21 AM

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,034,418,773	(1,034,418,773)	(100.00)
Persediaan	476,702,771	434,783,170	41,919,601	9.64
JUMLAH ASET LANCAR	476,702,771	1,469,201,943	(992,499,172)	(67.55)
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	116,512,418,038	92,877,000,717	23,635,417,321	25.45
Gedung dan Bangunan	353,165,757,229	335,299,814,950	17,865,942,279	5.33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,359,677,154	9,395,644,993	2,964,032,161	31.55
Aset Tetap Lainnya	3,074,558,997	2,972,643,997	101,915,000	3.43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	6,958,045,430	(6,958,045,430)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(122,664,142,634)	(96,521,081,709)	(26,143,060,925)	27.09
JUMLAH ASET TETAP	1,451,448,336,784	1,439,982,136,378	11,466,200,406	0.80
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,143,147,433	2,537,559,833	605,587,600	23.86
Aset Lain-lain	5,188,629,286	8,310,389,928	(3,121,760,642)	(37.56)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(5,710,237,777)	(8,192,449,669)	2,482,211,892	(30.30)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,621,538,942	2,655,500,092	(33,961,150)	(1.28)
JUMLAH ASET	1,454,546,578,497	1,444,106,838,413	10,439,740,084	0.72
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	349,715,146	0	349,715,146	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	100,520,386	75,798,211	24,722,175	32.62
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	450,235,532	75,798,211	374,437,321	493.99
JUMLAH KEWAJIBAN	450,235,532	75,798,211	374,437,321	493.99
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,454,096,342,965	1,444,031,040,202	10,065,302,763	0.70
JUMLAH EKUITAS	1,454,096,342,965	1,444,031,040,202	10,065,302,763	0.70
JUMLAH EKUITAS	1,454,096,342,965	1,444,031,040,202	10,065,302,763	0.70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,454,546,578,497	1,444,106,838,413	10,439,740,084	0.72

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM Tgl Data 20/02/23 7:14 AM

Tgl. Cetak 20/02/2023 9:21 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	223,990,194,502
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,152,919,280	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	40,313,566
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	157,669,133
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	180,126,972
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	596,600,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	376,395,450
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	106,868,503
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,566,660
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,686,378,996
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,934,681,216	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	344,151	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,688
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,385,518,914	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,170,450
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	365,551,766	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	887,115,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	287,100,120
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,502,230,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	185,050
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	149,766,042	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,130,331,360	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	217,260
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,579,876,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	581,760,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	9,250,500
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,535,625,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,946,536,418	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,902,310	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,238,320,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,303,464,734	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,172,082,590	0
3.1	521131	Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,200,000
3.0	521211	Belanja Bahan	17,646,975,659	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	1,348,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,071,980,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	18,483,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,484,575,526	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	7,650,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM Tgl Data 20/02/23 7:14 AM

Tgl. Cetak 20/02/2023 9:21 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4,474,017,553	0
3.1	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	7,128,600
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	30,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	866,500,599	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	823,510,820	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	689,479,829	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,278,233,683	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	15,616,796	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,796,950	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,798,478,837	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	129,297,451
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	69,870,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	6,099,316,919	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	26,643,613
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	27,447,499,990	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	52,702,652
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	750,150,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,948,058,358	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,652,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,826,954,247	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,395,690,336	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,362,498,298	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	17,459,684,304	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	586,182,629
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,077,669,286	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	12,900,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	130,362,000	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	2,800,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,326,082,004	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	70,397,983
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,138,078,489	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,999,335,914	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	361,898,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	913,087,600	0
JUMLAH			228,363,426,778	228,363,426,778

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM Tgl Data 20/02/23 7:07 AM

Tgl. Cetak 20/02/2023 9:21 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	396,134,911	0
0.0	117112	Amunisi	4,400,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	76,167,860	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	116,512,418,038	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	353,165,757,229	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,074,558,997	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	73,255,577,125
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	41,872,663,554
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	5,013,590,061
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	108,948,719
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	875,863,175
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	162151	Software	3,143,147,433	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5,188,629,286	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,846,989,356
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,863,248,421
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	349,715,146
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	100,520,386
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	223,990,194,502
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,152,919,280	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	14,352,153,215
0.0	391111	Ekuitas	0	1,444,031,040,202
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	474,376,693	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	118,500,000	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	99,500,000
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1,924,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	40,313,566
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	157,669,133
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	155,404,797
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	596,600,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	376,395,450
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	106,868,503
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,566,660
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	651,960,223
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	21,934,681,216	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM Tgl Data 20/02/23 7:07 AM

Tgl. Cetak 20/02/2023 9:21 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	340,463	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,384,348,464	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	365,551,766	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	600,014,880	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,502,044,950	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	149,766,042	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,130,114,100	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,579,876,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	572,509,500	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,535,625,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	13,946,536,418	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,902,310	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,238,320,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,303,464,734	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,167,882,590	0
3.0	521211	Beban Bahan	17,645,627,659	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,053,497,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	36,476,925,526	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4,466,888,953	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	206,683,530	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	30,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,618,644,865	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	16,530,860	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,174,750	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,676,193,486	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	69,870,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,072,673,306	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	27,394,797,338	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	750,150,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,945,406,358	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,826,954,247	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,362,498,298	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	16,873,501,675	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,064,769,286	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	127,562,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,255,684,021	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14,506,183,563	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,257,207,066	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,147,669,952	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	19,808,858	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data 20/02/23 7:07 AM

Tgl. Cetak 20/02/2023 9:21 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	10,156,250	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	558,299,623	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	88,928,427	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,056,462,207	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	39,600,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	679,275,776	0
JUMLAH			1,813,391,282,194	1,813,391,282,194

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI

Tgl. Cetak 20/02/2023

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	1,034,418,773	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	382,865,570	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	51,917,600	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	92,877,000,717	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	335,299,814,950	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	6,958,045,430	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	58,796,454,521
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	32,255,569,942
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,976,710,460
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	89,139,861
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	865,706,925
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	162151	Software	2,537,559,833	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,310,389,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,887,500,871
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,304,948,798
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	75,798,211
0.0	391111	Ekuitas	0	1,444,031,040,202
JUMLAH			1,548,820,369,791	1,548,820,369,791

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



Waktu Olap: 2023-02-20 07:13:47.0 [B@59362952]

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
 Tanggal : 20/02/23 9:21 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif-SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,047,500,000	3,152,919,280	2,105,419,280	301	1,081,139,000	2,390,398,387	1,309,259,387	221
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,047,500,000	3,152,919,280	2,105,419,280	301	1,081,139,000	2,390,398,387	1,309,259,387	221
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	34,211,419,000	33,754,872,381	(456,546,619)	99	34,280,563,000	34,020,333,152	(260,229,848)	99
	BELANJA BARANG	171,568,647,000	166,822,922,118	(4,745,724,882)	97	127,581,463,000	124,595,754,966	(2,985,708,034)	98
	BELANJA MODAL	23,657,100,000	23,412,400,003	(244,699,997)	99	119,317,645,000	118,625,263,099	(692,381,901)	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



Waktu Olap: 2023-02-20 07:13:47.0 [B@479d7a1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 20/02/23 9:21 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif-SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	229,437,166,000	223,990,194,502	(5,446,971,498)	98	281,179,671,000	277,241,351,217	(3,938,319,783)	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 20/02/23 9:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	40,313,566	0	40,313,566	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	157,669,133	0	157,669,133	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	60,000,000	180,126,972	0	180,126,972	300.21
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	60,000,000	378,109,671	0	378,109,671	630.18
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	596,600,000	0	596,600,000	60.42
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	596,600,000	0	596,600,000	60.42
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	376,395,450	0	376,395,450	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	376,395,450	0	376,395,450	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	106,868,503	0	106,868,503	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,566,660	0	8,566,660	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,686,378,996	0	1,686,378,996	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,801,814,159	0	1,801,814,159	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,047,500,000	3,152,919,280	0	3,152,919,280	300.99
	JUMLAH PENDAPATAN	1,047,500,000	3,152,919,280	0	3,152,919,280	300.99

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/02/23 9:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,392,760,000	21,987,293,000	21,934,681,216	0	21,934,681,216	99.76	52,611,784
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	390,000	439,000	344,151	3,688	340,463	77.55	98,537
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,585,896,000	1,392,110,000	1,385,518,914	1,170,450	1,384,348,464	99.44	7,761,536
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	346,271,000	370,367,000	365,551,766	0	365,551,766	98.7	4,815,234
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,015,150,000	897,395,000	887,115,000	287,100,120	600,014,880	66.86	297,380,120
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,651,450,000	2,504,291,000	2,502,230,000	185,050	2,502,044,950	99.91	2,246,050
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	145,123,000	152,000,000	149,766,042	0	149,766,042	98.53	2,233,958
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,191,079,000	1,137,174,000	1,130,331,360	217,260	1,130,114,100	99.38	7,059,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,951,941,000	3,644,795,000	3,579,876,000	0	3,579,876,000	98.22	64,919,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	781,477,000	584,486,000	581,760,000	9,250,500	572,509,500	97.95	11,976,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	31,061,537,000	32,670,350,000	32,517,174,449	297,927,068	32,219,247,381	99.53	451,102,619
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,573,534,000	1,541,069,000	1,535,625,000	0	1,535,625,000	99.65	5,444,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,573,534,000	1,541,069,000	1,535,625,000	0	1,535,625,000	99.65	5,444,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	32,635,071,000	34,211,419,000	34,052,799,449	297,927,068	33,754,872,381	99.54	456546619
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,352,933,000	14,087,574,000	13,946,536,418	0	13,946,536,418	99	141,037,582
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,400,000	25,397,000	4,902,310	0	4,902,310	19.3	20,494,690
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,383,505,000	1,310,953,000	1,238,320,000	0	1,238,320,000	94.46	72,633,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,120,920,000	1,345,229,000	1,303,464,734	0	1,303,464,734	96.9	41,764,266
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,886,937,000	2,183,086,000	2,172,082,590	4,200,000	2,167,882,590	99.3	15,203,410
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	16,775,695,000	18,952,239,000	18,665,306,052	4,200,000	18,661,106,052	98.49	291,132,948
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	49,925,685,000	18,144,357,000	17,646,975,659	1,348,000	17,645,627,659	97.25	498,729,341
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,615,785,000	2,136,792,000	2,071,980,000	18,483,000	2,053,497,000	96.1	83,295,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35,863,802,000	36,570,952,000	36,484,575,526	7,650,000	36,476,925,526	99.74	94,026,474
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	3,717,500,000	4,802,153,000	4,474,017,553	7,128,600	4,466,888,953	93.02	335,264,047
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	92,122,772,000	61,684,254,000	60,707,548,738	34,609,600	60,672,939,138	98.42	1,011,314,862
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	297,801,000	872,947,000	866,500,599	0	866,500,599	99.26	6,446,401
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	718,425,000	837,547,000	823,510,820	0	823,510,820	98.32	14,036,180
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	26,780,000	690,820,000	689,479,829	0	689,479,829	99.81	1,340,171

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/02/23 9:21 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,043,006,000	2,401,314,000	2,379,491,248	0	2,379,491,248	99.09	21,822,752
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,142,000,000	3,283,174,000	3,278,233,683	0	3,278,233,683	99.85	4,940,317
522112	Belanja Langganan Telepon	54,720,000	17,272,000	15,616,796	0	15,616,796	90.42	1,655,204
522113	Belanja Langganan Air	11,400,000	8,990,000	6,796,950	0	6,796,950	75.61	2,193,050
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,576,611,000	4,802,952,000	4,798,478,837	129,297,451	4,669,181,386	97.21	133,770,614
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	70,000,000	69,870,000	0	69,870,000	99.81	130,000
522141	Belanja Sewa	15,892,210,000	6,130,873,000	6,099,316,919	26,643,613	6,072,673,306	99.05	58,199,694
522151	Belanja Jasa Profesi	30,897,500,000	28,213,066,000	27,447,499,990	52,702,652	27,394,797,338	97.1	818,268,662
522191	Belanja Jasa Lainnya	865,032,000	763,160,000	750,150,000	0	750,150,000	98.3	13,010,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,113,847,000	3,093,938,000	2,948,058,358	2,652,000	2,945,406,358	95.2	148,531,642
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	58,553,320,000	46,383,425,000	45,414,021,533	211,295,716	45,202,725,817	97.91	1,180,699,183
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,333,965,000	12,049,880,000	11,826,954,247	0	11,826,954,247	98.15	222,925,753
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	922,055,000	1,401,791,000	1,395,690,336	0	1,395,690,336	99.56	6,100,664
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,453,479,000	3,432,209,000	3,362,498,298	0	3,362,498,298	97.97	69,710,702
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	8,716,999,000	16,883,880,000	16,585,142,881	0	16,585,142,881	98.23	298,737,119
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	62,697,438,000	18,446,860,000	17,459,684,304	586,182,629	16,873,501,675	91.47	1,573,358,325
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,956,990,000	1,270,551,000	1,077,669,286	12,900,000	1,064,769,286	83.8	205,781,714
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	130,752,000	130,362,000	2,800,000	127,562,000	97.56	3,190,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,201,849,000	5,415,372,000	5,326,082,004	70,397,983	5,255,684,021	97.05	159,687,979
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	68,856,277,000	25,263,535,000	23,993,797,594	672,280,612	23,321,516,982	94.97	1,942,018,018
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	246,068,069,000	171,568,647,000	167,745,308,046	922,385,928	166,822,922,118	97.77	4745724882
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,479,000,000	13,290,137,000	13,138,078,489	0	13,138,078,489	98.86	152,058,511
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,479,000,000	13,290,137,000	13,138,078,489	0	13,138,078,489	98.86	152,058,511
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	9,087,407,000	8,999,335,914	0	8,999,335,914	99.03	88,071,086
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	361,898,000	361,898,000	0	361,898,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	9,449,305,000	9,361,233,914	0	9,361,233,914	99.07	88,071,086
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	917,658,000	913,087,600	0	913,087,600	99.5	4,570,400

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/02/23 9:21 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	917,658,000	913,087,600	0	913,087,600	99.5	4,570,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,479,000,000	23,657,100,000	23,412,400,003	0	23,412,400,003	98.97	244699997
	JUMLAH BELANJA	284,182,140,000	229,437,166,000	225,210,507,498	1,220,312,996	223,990,194,502	98.16	5,446,971,498

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/02/23 9:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,886,937,000	2,183,086,000	2,172,082,590	4,200,000	2,167,882,590	99.3	15,203,410
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,886,937,000	2,183,086,000	2,172,082,590	4,200,000	2,167,882,590	99.5	15,203,410
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,717,500,000	4,802,153,000	4,474,017,553	7,128,600	4,466,888,953	93.02	335,264,047
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,717,500,000	4,802,153,000	4,474,017,553	7,128,600	4,466,888,953	93.17	335,264,047
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	26,780,000	690,820,000	689,479,829	0	689,479,829	99.81	1,340,171
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	26,780,000	690,820,000	689,479,829	0	689,479,829	99.81	1,340,171
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,113,847,000	3,093,938,000	2,948,058,358	2,652,000	2,945,406,358	95.2	148,531,642
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,113,847,000	3,093,938,000	2,948,058,358	2,652,000	2,945,406,358	95.28	148,531,642
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,745,064,000	10,769,997,000	10,283,638,330	13,980,600	10,269,657,730	95.48	500339270
	JUMLAH BELANJA	10,745,064,000	10,769,997,000	10,283,638,330	13,980,600	10,269,657,730	95.48	500,339,270

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 20/02/23 9:20 AM
Halaman : 1
Tgl Data : 20/2/23 7:16 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,128,400,247	1,061,438,630	66,961,617	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,128,400,247	1,061,438,630	66,961,617	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,128,400,247	1,061,438,630	66,961,617	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	33,754,872,381	34,020,333,152	(265,460,771)	-
Beban Persediaan	3,096,062,207	1,953,991,427	1,142,070,780	-
Beban Barang dan Jasa	125,093,169,683	94,190,195,817	30,902,973,866	-
Beban Pemeliharaan	15,868,728,321	11,939,285,152	3,929,443,169	-
Beban Perjalanan Dinas	23,321,516,982	16,616,890,640	6,704,626,342	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 20/02/23 9:20 AM
Halaman : 2
Tgl Data : 20/2/23 7:16 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	25,588,253,739	19,961,407,876	5,626,845,863	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	226,722,603,313	178,682,104,064	48,040,499,249	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(225,594,203,066)	(177,620,665,434)	(47,973,537,632)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	197,982,699	79,141,388	118,841,311	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	197,982,699	79,141,388	118,841,311	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	767,395,386	971,841,383	(204,445,997)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	767,395,386	1,224,698,383	(457,302,997)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	252,857,000	(252,857,000)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	965,378,085	1,050,982,771	(85,604,686)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(224,628,824,981)	(176,569,682,663)	(48,059,142,318)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(224,628,824,981)	(176,569,682,663)	(48,059,142,318)	-

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021
(dalam rupiah)**



Tgl Data : 20/02/23 7:16 AM

Kode Lap : Lpe.es1

Tanggal : 20/02/23 9:21 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_es1-SAKTI

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I**

: 013

: 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,444,031,040,202	1,342,991,582,367	101,039,457,835	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(224,628,824,981)	(176,569,682,663)	(48,059,142,318)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(594,800,693)	(1,179,267,311)	584,466,618	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(1,924,000)	(5,512,500)	3,588,500	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(592,876,693)	(1,174,029,811)	581,153,118	-
LAIN-LAIN	0	275,000	(275,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	235,288,928,437	278,788,407,809	(43,499,479,372)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10,065,302,763	101,039,457,835	(90,974,155,072)	-
EKUITAS AKHIR	1,454,096,342,965	1,444,031,040,202	10,065,302,763	-

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UAPPB-E1 : 12

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

Tgl.Data : 20/02/23 6:00 AM

Tgl.Cetak : 20/02/23 9:31 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	396,134,911
117112	Amunisi	4,400,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	76,167,860
131111	Tanah	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	116,512,418,038
133111	Gedung dan Bangunan	353,165,757,229
134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,178,766,300
135121	Aset Tetap Lainnya	3,074,558,997
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(73,255,577,125)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(41,872,663,554)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(5,013,590,061)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(108,948,719)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(875,863,175)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,537,500,000)
162151	Software	3,143,147,433
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5,188,629,286
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,846,989,356)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,863,248,421)
J U M L A H		1,454,546,578,497

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 20/02/23 9:23 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	195,275	1,089,000,068,000	0	0	0	0	195,275	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	195,275	1,089,000,068,000	0	0	0	0	195,275	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	13,963	92,877,000,717	1,840	29,170,584,287	108	5,535,166,966	15,695	116,512,418,038
30101	ALAT BESAR DARAT	7	221,856,000	3	16,500,000	0	0	10	238,356,000
30103	ALAT BANTU	48	1,479,582,820	12	237,839,000	0	0	60	1,717,421,820
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	64	9,729,975,500	31	8,527,511,590	16	4,937,779,646	79	13,319,707,444
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	13	41,858,000	0	0	0	0	13	41,858,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	26	95,825,000	0	0	0	0	26	95,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	6,150,000	8	294,144,700	1	14,985,000	10	285,309,700
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	9	34,083,005	0	0	1	1,350,000	8	32,733,005
30501	ALAT KANTOR	1,634	10,414,349,650	455	2,036,537,316	0	0	2,089	12,450,886,966
30502	ALAT RUMAH TANGGA	9,364	36,705,899,061	878	8,777,908,214	74	359,123,300	10,168	45,124,683,975
30601	ALAT STUDIO	294	7,770,517,594	12	4,068,267,187	0	0	306	11,838,784,781
30602	ALAT KOMUNIKASI	180	1,273,858,925	21	88,500,000	0	0	201	1,362,358,925
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	366	1,039,508,000	62	221,483,000	0	0	428	1,260,991,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	26,776,000	0	0	0	0	5	26,776,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	44	705,180,500	34	255,397,760	0	0	78	960,578,260
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	19	90,553,000	0	0	70	637,257,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,144	16,547,359,089	222	3,880,405,720	15	208,679,020	1,351	20,219,085,789
31002	PERALATAN KOMPUTER	589	4,099,545,673	72	493,976,000	1	13,250,000	660	4,580,271,673
31301	SUMUR	9	151,957,000	0	0	0	0	9	151,957,000
31503	ALAT SAR	5	262,223,100	0	0	0	0	5	262,223,100
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	5	73,855,000	0	0	14	312,987,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	46,750,000	0	0	0	0	2	46,750,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	36	199,509,400	6	107,705,800	0	0	42	307,215,200
133111	Gedung dan Bangunan	59	335,299,814,950	11	60,049,567,765	4	42,183,625,486	66	353,165,757,229
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	38	260,603,835,920	7	42,370,999,341	3	42,003,825,486	42	260,971,009,775
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	17	63,399,897,681	2	17,318,968,424	0	0	19	80,718,866,105
40401	TUGU/TANDA BATAS	4	11,296,081,349	2	359,600,000	1	179,800,000	5	11,475,881,349

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 20/02/23 9:23 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	5	1,178,766,300	0	0	0	0	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	18	101,915,000	0	0	9,061	3,074,558,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	18	101,915,000	0	0	353	1,639,415,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,338	8,310,389,928	77	390,123,460	710	3,511,884,102	705	5,188,629,286
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	22	2,269,616,646	0	0	10	1,599,822,400	12	669,794,246
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	1	1,350,000	0	0	1	1,350,000
30501	ALAT KANTOR	220	2,033,429,282	0	0	149	660,169,282	71	1,373,260,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	854	436,809,966	74	359,123,300	443	441,162,800	485	354,770,466
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	5	10,409,650	4	548,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	12	36,818,500	0	0	1	6,360,000	11	30,458,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	3	3,242,000	0	0	2	162,000	1	3,080,000
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	1	16,400,160	80	764,659,088	36	352,559,846
31002	PERALATAN KOMPUTER	21	19,633,882	1	13,250,000	19	10,503,882	3	22,380,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	1	18,635,000	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	9	1,394,712,000	0	0	0	0	9	1,394,712,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,537,855,562,585		92,676,222,673		51,230,676,554		1,579,301,108,704

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 20/02/23 9:23 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_ekstra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	4,199	1,485,656,607	645	470,286,280	3	1,649,000	4,841	1,954,293,887
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	125,000	0	0	0	0	1	125,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
30501	ALAT KANTOR	789	151,618,750	12	9,640,720	0	0	801	161,259,470
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3,148	1,208,602,971	633	460,645,560	3	1,649,000	3,778	1,667,599,531
30601	ALAT STUDIO	52	35,819,248	0	0	0	0	52	35,819,248
30602	ALAT KOMUNIKASI	35	13,762,500	0	0	0	0	35	13,762,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	23	14,951,358	0	0	0	0	23	14,951,358
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	22	13,180,000	0	0	0	0	22	13,180,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	36	27,708,280	0	0	0	0	36	27,708,280
31503	ALAT SAR	1	918,500	0	0	0	0	1	918,500
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	80	15,920,000	0	0	0	0	80	15,920,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	11	2,350,000	0	0	0	0	11	2,350,000
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	12	22,771,500	12	22,771,500	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	12	22,771,500	12	22,771,500	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	15	2,225,010	3	1,649,000	1	225,000	17	3,649,010
30501	ALAT KANTOR	4	2,000,000	0	0	0	0	4	2,000,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	225,000	3	1,649,000	1	225,000	3	1,649,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	10	10	0	0	0	0	10	10
TOTAL			1,487,881,617		494,706,780		24,645,500		1,957,942,897

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 20/02/23 9:23 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	195,275	1,089,000,068,000	0	0	0	0	195,275	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	195,275	1,089,000,068,000	0	0	0	0	195,275	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	18,162	94,362,657,324	2,485	29,640,870,567	111	5,536,815,966	20,536	118,466,711,925
30101	ALAT BESAR DARAT	7	221,856,000	3	16,500,000	0	0	10	238,356,000
30103	ALAT BANTU	48	1,479,582,820	12	237,839,000	0	0	60	1,717,421,820
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	64	9,729,975,500	31	8,527,511,590	16	4,937,779,646	79	13,319,707,444
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	13	41,858,000	0	0	0	0	13	41,858,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	26	95,825,000	0	0	0	0	26	95,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	6,275,000	8	294,144,700	1	14,985,000	11	285,434,700
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	10	34,783,005	0	0	1	1,350,000	9	33,433,005
30501	ALAT KANTOR	2,423	10,565,968,400	467	2,046,178,036	0	0	2,890	12,612,146,436
30502	ALAT RUMAH TANGGA	12,512	37,914,502,032	1,511	9,238,553,774	77	360,772,300	13,946	46,792,283,506
30601	ALAT STUDIO	346	7,806,336,842	12	4,068,267,187	0	0	358	11,874,604,029
30602	ALAT KOMUNIKASI	215	1,287,621,425	21	88,500,000	0	0	236	1,376,121,425
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	389	1,054,459,358	62	221,483,000	0	0	451	1,275,942,358
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	27	39,956,000	0	0	0	0	27	39,956,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	44	705,180,500	34	255,397,760	0	0	78	960,578,260
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	19	90,553,000	0	0	70	637,257,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,144	16,547,359,089	222	3,880,405,720	15	208,679,020	1,351	20,219,085,789
31002	PERALATAN KOMPUTER	625	4,127,253,953	72	493,976,000	1	13,250,000	696	4,607,979,953
31301	SUMUR	9	151,957,000	0	0	0	0	9	151,957,000
31503	ALAT SAR	6	263,141,600	0	0	0	0	6	263,141,600
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	5	73,855,000	0	0	14	312,987,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	82	62,670,000	0	0	0	0	82	62,670,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	47	201,859,400	6	107,705,800	0	0	53	309,565,200
133111	Gedung dan Bangunan	59	335,299,814,950	23	60,072,339,265	16	42,206,396,986	66	353,165,757,229
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	38	260,603,835,920	19	42,393,770,841	15	42,026,596,986	42	260,971,009,775
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	17	63,399,897,681	2	17,318,968,424	0	0	19	80,718,866,105
40401	TUGU/TANDA BATAS	4	11,296,081,349	2	359,600,000	1	179,800,000	5	11,475,881,349

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 20/02/23 9:23 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	5	1,178,766,300	0	0	0	0	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	18	101,915,000	0	0	9,061	3,074,558,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	18	101,915,000	0	0	353	1,639,415,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,353	8,312,614,938	80	391,772,460	711	3,512,109,102	722	5,192,278,296
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	22	2,269,616,646	0	0	10	1,599,822,400	12	669,794,246
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	1	1,350,000	0	0	1	1,350,000
30501	ALAT KANTOR	224	2,035,429,282	0	0	149	660,169,282	75	1,375,260,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	855	437,034,966	77	360,772,300	444	441,387,800	488	356,419,466
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	5	10,409,650	4	548,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	22	36,818,510	0	0	1	6,360,000	21	30,458,510
30701	ALAT KEDOKTERAN	3	3,242,000	0	0	2	162,000	1	3,080,000
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	1	16,400,160	80	764,659,088	36	352,559,846
31002	PERALATAN KOMPUTER	21	19,633,882	1	13,250,000	19	10,503,882	3	22,380,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	1	18,635,000	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	9	1,394,712,000	0	0	0	0	9	1,394,712,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,539,343,444,202		93,170,929,453		51,255,322,054		1,581,259,051,601

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 20/02/23 9:24 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	107	2,537,559,833	5	605,587,600	0	0	112	3,143,147,433
80101	ASET TAK BERWUJUD	107	2,537,559,833	5	605,587,600	0	0	112	3,143,147,433
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	5	357,550,000	5	357,550,000	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	5	357,550,000	5	357,550,000	0	0
TOTAL			2,537,559,833		963,137,600		357,550,000		3,143,147,433

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UAPPB-E1 : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 20/02/23 9:25 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		112	3,143,147,433	(1,304,948,798)	(558,299,623)	0	(1,863,248,421)	1,279,899,012
80101	ASET TAK BERWUJUD		112	3,143,147,433	(1,304,948,798)	(558,299,623)	0	(1,863,248,421)	1,279,899,012
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			112	3,143,147,433	(1,304,948,798)	(558,299,623)	0	(1,863,248,421)	1,279,899,012